BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Edisi : 05 Maret 2008
Subyek : Pembalakan Liar
Halaman : 24

PEMBALAKAN
Bupati Dituntut Bebaskan 33 Tersangka

Ketapang, Kompas - Sekitar 200 pemilik 34.500 batang kayu log yang disita Tim Gabungan Pemberantasan Illegal Logging Kapuas Hulu, Selasa (4/3), berunjuk rasa di Kantor Bupati Kapuas Hulu. Warga dari lima kecamatan di daerah aliran Sungai Kapuas, di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, itu menuntut bupati membebaskan 33 rekan mereka yang ditahan di Kepolisian Resor Sintang. Selain itu, pengunjuk rasa meminta agar ribuan kayu yang disita Tim Gabungan dikembalikan kepada ke-33 tersangka tersebut.

Alexius Tomo, warga Kecamatan Embaloh Hilir yang menjadi juru bicara warga, yang dihubungi per telepon kemarin mengatakan, dalam unjuk rasa kemarin, sejumlah perwakilan warga ditemui Wakil Bupati Kapuas Hulu Y Alexander, yang juga adalah Ketua Tim Pemberantasan Illegal Logging Kapuas Hulu.

Menanggapi tuntutan pengunjuk rasa soal pembebasan warga, lanjut Tomo, Alexander menyatakan, hal itu tidak mungkin dilakukan pihaknya karena kasus tersebut ditangani Polres Sintang. Demikian pula soal pengembalian ribuan kayu yang disita. Untuk tuntutan yang satu ini pun, kata Alexander lagi, pemerintah daerah tak bisa berbuat apa-apa, mengingat kasusnya sudah mengemuka hingga tingkat nasional.

Tidak puas

Alexander dalam kesempatan itu hanya menjanjikan akan menyampaikan aspirasi warga ke gubernur dan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Mendengar ucapan itu, para pengunjuk rasa mengaku kecewa. Meski demikian, mereka tak menuntut lebih lanjut dan membubarkan diri pukul 12.00 WIB. Penahanan ke-33 warga itu diprotes, mengingat status ratusan warga pemilik 34.500 kayu log yang ditangkap—setelah kasus ke-33 warga tersebut—di Sungai Kapuas beberapa pekan lalu hingga kini belum ditetapkan.

Sementara itu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, puluhan warga dari tempat usaha perkayuan di Alalak sejak Kamis pekan lalu menginap di DPRD Kalsel. Hal ini dilakukan dengan harapan DPRD Kalimantan Selatan memenuhi imbauan mereka untuk berupaya membuat peraturan daerah tentang tata niaga perkayuan.

Tuntutan tersebut dinilai penting disampaikan, mengingat sekarang ini para pengusaha merasa benar-benar kesulitan mendapatkan pasokan kayu akibat gencarnya operasi pemberantasan pembalakan ilegal.

Selain itu, perlunya peraturan tentang tata niaga perkayuan itu, menurut sejumlah pengunjuk rasa, sudah disampaikan beberapa kali, tetapi belum ada respons positif. (WHY/FUL)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup